



KOTA BEKASI
2024

**PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN
INOVASI DAERAH**

INOVASI DAERAH
APLIKASI SISTEM PELAPORAN PEMBANGUNAN
(SIMPELBANG)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (Suriyati, 2018).

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat yakni kesejahteraan yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya (Azzumar, 2009). Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah, untuk itu peningkatannya harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional (Arsyad, 1997). Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pembangunan nasional kearah yang lebih baik. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang No. 32 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001.

Pengelolaan keuangan daerah juga harus mengacu pada prinsip-prinsip *good government* dan *clean government*. Pemerintah daerah dalam kedudukannya sebagai pelayan publik diharapkan mampu secara total menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan untuk pelayanan terhadap masyarakat. Konsep *good government* dan *clean government* adalah sebuah konsesus yang ingin dicapai pemerintah dan telah mengalami transformasi semenjak tuntutan pola pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, adil, transparan dan bertanggung-jawab berkembang ditengah-tengah masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan konsep tersebut adalah optimalisasi pemanfaatan *e-government* dalam perbaikan kinerja dan pelayanan organisasi publik yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 (Letty, 2016).

Isu strategis pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 menempatkan isu penguatan struktur ekonomi kota sebagai inti dari isu strategis pembangunan kota yang terintegrasi dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang meliputi beberapa perspektif, yaitu isu pembangunan pilar Sosial, isu pembangunan pilar Ekonomi, isu pembangunan pilar Lingkungan, dan isu pembangunan pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan. Bahwa dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang efisien, efektif dan tepat sasaran serta menjamin tertib administrasi pelaksanaan pembangunan maka diperlukan Sistem Pelaporan Pembangunan. Sistem Pelaporan Oleh karena itu dibuatlah Aplikasi Sistem Pelaporan Pembangunan (SIMPELBANG) sebagai sistem pelaporan pembangunan yang dapat menghasilkan laporan pelaksanaan pembangunan yang *real time*, konsisten dan dapat dipertanggung-jawabkan.

B. TUJUAN

Tiga tujuan dari permasalahan yang dijelaskan di atas adalah:

1. Mewujudkan Tujuan Nasional: Pembangunan nasional dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, seperti melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan Daerah: Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur bagi masyarakat. Dalam upaya tersebut, kegiatan pembangunan nasional diarahkan untuk merata ke setiap daerah, terutama daerah yang memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatan. Peningkatan kemampuan daerah ini akan didukung oleh pembangunan

daerah yang terintegrasi dan serasi dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional secara menyeluruh.

3. Menerapkan Prinsip Good Government dan Clean Government: Pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada prinsip good government dan clean government, yang meliputi efektivitas, efisiensi, kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu upaya untuk menerapkan konsep ini adalah melalui optimalisasi pemanfaatan e-government untuk perbaikan kinerja dan pelayanan organisasi publik, yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.

C. MANFAAT

Manfaat yang diperoleh dari Aplikasi Sistem Pelaporan Pembangunan adalah : Dengan adanya Aplikasi SIMPELBANG maka pelaporan pembangunan berbasis *online* yang mengusung konsep kemudahan, kecepatan dan ketepatan dapat meningkatkan kinerja pegawai serta memudahkan pengawasan internal maupun *eksternal* sehingga monitoring dan evaluasi kegiatan APBD dapat terwujud secara optimal.

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Sejalan dengan semakin berkembangnya penerapan ilmu teknologi dan informasi pada pembangunan di Indonesia, studi-studi tentang inovasi kian menarik untuk terus dikaji, terutama kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Adapun sifat-sifat ekstrinsik inovasi meliputi :

1. Kesesuaian (*compability*) inovasi dengan lingkungan setempat (baik lingkungan fisik, sosial budaya, politik, dan kemampuan ekonomis masyarakatnya).
2. Tingkat keunggulan relatif dari inovasi yang ditawarkan, atau keunggulan lain yang dimiliki oleh inovasi dibanding dengan teknologi yang sudah ada yang akan diperbaharui/digantikannya, baik keunggulan teknis (kecocokan dengan keadaan alam setempat, tingkat produktivitasnya), ekonomis (besarnya biaya atau keuntungannya), manfaat non ekonomi, maupun dampak sosial budaya dan politis yang ditimbulkannya.

Adapun dalam inovasi ini, dilakukan dengan metode seefisien mungkin dan seefektif mungkin dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Proses kecepatan penciptaan inovasi daerah ini dikerjakan selama 1-3 bulan.**

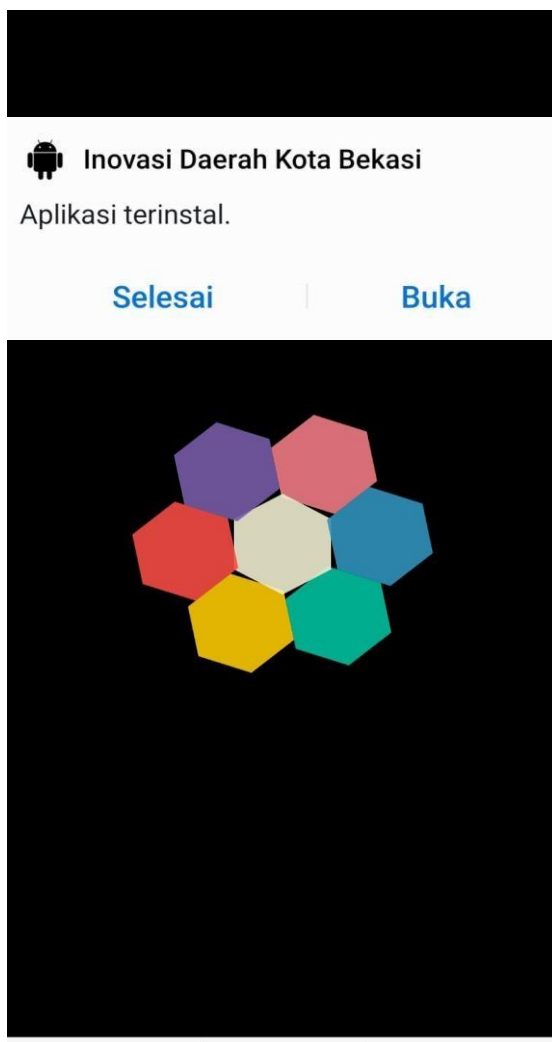
Tahapan kegiatan dalam pembentukan inovasi ini dapat disajikan sebagai berikut:

Tahapan	Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang ada di masyarakat : 1. Penelitian dan Pemahaman 2. Pengumpulan Informasi 3. Analisis Masalah 4. Pernyataan Masalah												
Merancang inovasi secara detail : 1. Definisi Tujuan. 2. Ideasi dan Konsep. 3. Pemilihan Konsep. 4. Rancangan Detail 5. Prototipe dan Uji Coba. 6. Perencanaan Implementasi												
Melakukan uji coba untuk memastikan fungsionalitas dan kualitas : 1. Perencanaan Uji Coba 2. Pembuatan Prototipe 3. Pemilihan Pengguna atau Sampel 4. Pelaksanaan Uji Coba 5. Evaluasi Hasil Iterasi dan Perbaikan 6. Uji Coba												

Lanjutan (Opsional)												
7. Kesiapan Peluncuran												
Melakukan peluncuran inovasi :												
1. Persiapan Strategis												
2. Pengembangan Pemasaran												
3. Kesiapan Produk												
4. Komunikasi Internal												
5. Peluncuran Resmi												
6. Pemantauan dan Evaluasi												
7. Iterasi dan Pengembangan Lanjutan												
8. Skalabilitas dan Pertumbuhan												
Melakukan monitoring dan evaluasi :												
1. Penetapan Kriteria Evaluasi												
2. Pengumpulan Data												
3. Analisis Data												
4. Perbaikan dan Iterasi												
5. Pemantauan Kontinu												
6. Pembelajaran dan Adaptasi												

E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)

Teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat. Penerapannya dapat menjadi sangat penting dan sangat membantu bagi pekerjaan manusia. Beberapa manfaat teknologi informasi antara lain mendapatkan informasi secara cepat dan mudah, efisiensi waktu dan biaya, serta mempermudah komunikasi. Dalam bidang perpustakaan, pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan agar lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh seorang pengguna ingin mengunjungi sebuah perpustakaan di kota tertentu, tetapi ia belum mengetahui lokasi perpustakaan tersebut. Salah satu solusi yang ditawarkan terkait dengan teknologi informasi dalam bidang perpustakaan adalah dengan menggunakan peta digital yang diimplementasikan melalui aplikasi *smartphone*. Dengan peta digital, setiap pengguna dapat memakai peta yang lebih interaktif dari sekadar gulungan kertas. Kelebihan yang lain adalah pada peta digital mudah disimpan dan dipindahkan dari satu media penyimpanan ke media penyimpanan yang lain. Untuk hal itu inisiator inovasi menerapkan kemudahan layanan informasi dengan didukung aplikasi android. berikut layanan informasi dapat diakses dengan menginstal hal berikut :



F. SIGNIFIKANSI

Menginventarisasi data progres dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk digital, mendokumentasikan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan secara *real time* dan dapat diakses secara spasial sehingga diperoleh Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk dalam suatu daerah merupakan subyek dan obyek pembangunan. Semakin bagus kualitas penduduk suatu daerah maka akan semakin baik pembangunan daerah tersebut. Jumlah penduduk Kota Bekasi tahun 2019 mencapai 2.448.830 jiwa. Pada tahun 2018 terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.235.491 dan perempuan sebanyak 1.213.340 dan rasio jenis kelamin 101,83. Terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan, dengan rata-rata rasio periode 2012-2016 sebesar 101,67. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Bekasi selama periode 2014-2018 sebesar 2,99 persen.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN INOVASI

Ide Inovatif SIMPELBANG ini datang disebabkan karena belum tersedianya laporan Rencana dan Realisasi Fisik Kegiatan/Sub Kegiatan yang valid, belum terintegrasinya laporan Rencana/Realisasi Keungan dan Realisasi Fisik, tidak adanya konsistensi dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, belum adanya dokumentasi proses tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. Adanya perubahan dalam pelaporan kegiatan pembangunan yang semula dengan sistem yang manual kemudian digantikan dengan sistem informasi aplikasi dan maka akan membutuhkan waktu dalam implementasinya. Perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap tentunya membutuhkan kesiapan baik bagi Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik maupun seluruh Satker di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru agar sistem aplikasi online dapat terimplementasi secara menyeluruh. Penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi sistem, sudah seharusnya memberikan kemudahan bagi petugas dan pengguna untuk menjalankannya. Fasilitas dalam aplikasi sistem pendataan dan pelaporan yang nantinya akan dikembangkan harus memberikan kemudahan dalam tampilannya. Sebagai proteksi awal, diperlukan fasilitas login untuk membatasi hak akses. Selanjutnya, konten dalam aplikasi harus dapat memberikan informasi bagi pengguna.

B. DESAIN INOVASI

SIMPELBANG menginventarisasi data progres dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk digital, mendokumentasikan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan secara *real time* dan dapat diakses secara spasial sehingga diperoleh Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Keberlanjutan untuk aplikasi SIMPELBAG dari segi sumber daya manusia yang terdiri dari *Team Leader*, tenaga ahli *programmer*, dan *database Designer*. Selanjutnya dari segi keuangan yaitu APBD. Metode yang digunakan adalah persiapan, analisa (Analisis Sistem Organisasi, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, Analisis dan Perancangan Sistem Perangkat Lunak dan Analisis dan Perancangan Basis Data), *Development* pada tahap development ini saatnya untuk menulis program, tahap ini juga mencakup tahap perbaikan *error* dan *testing*. Kemudian menulis program dengan terstruktur dan sesuai dengan *flowchart* yang telah di buat. *testing*, implementasi,

C. PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

Inovasi daerah yang kami buat memiliki mekanisme pelayanan yang cepat dan dapat beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, sehingga perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran baru, gagasan baru dan menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan pelayanan yang memuaskan pengguna. Inovasi kami bisa menghasilkan proses hanya dalam waktu 1 hari. Proses ini juga menghasilkan tersedianya laporan pelaksanaan pembangunan yang *real time*, konsisten dan dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB III

PENUTUP

Kegiatan inovasi ini dapat diidentifikasi beberapa kegiatan inovasi yang relevan, yaitu:

1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berkesinambungan, diperlukan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Sistem ini melibatkan unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang terkoordinasi dan efektif.
2. Desentralisasi Fiskal: Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara yang diadopsi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional secara merata ke setiap daerah. Dalam implementasinya, pemerintah daerah harus memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memperbesar kemampuan daerah dan menjalankan pembangunan yang serasi dan terpadu.
3. Optimalisasi *E-Government*: Konsep good government dan clean government menjadi konsensus yang ingin dicapai pemerintah dengan mengadopsi pola pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah melalui optimalisasi pemanfaatan *e-government* untuk perbaikan kinerja dan pelayanan organisasi publik.
4. Sistem Pelaporan Pembangunan: Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang efisien, efektif, dan tepat sasaran, dibutuhkan sistem pelaporan pembangunan yang dapat menghasilkan laporan pelaksanaan pembangunan secara real-time, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aplikasi Sistem Pelaporan Pembangunan (SIMPELBANG) merupakan salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut.

Semua kegiatan inovasi di atas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan mengadopsi inovasi-inovasi ini, diharapkan pembangunan Kota Bekasi dan seluruh Indonesia dapat berjalan lebih baik dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.



KOTA BEKASI
2024